

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan Perdesaan

Berikut adalah tinjauan teori mengenai kemiskinan berupa definisi, penyebab dan kriteria kemiskinan.

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan secara berbeda oleh beberapa badan/ instansi dan para ahli. Kemiskinan didefinisikan dengan dimensi yang lebih luas, yaitu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia secara fisik (kebutuhan dasar materi dan biologis termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan) serta sosial berupa risiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang. (World Bank, 2000)

Kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, berupa kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. (Badan Pusat Statistik, 2008).

Kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial yaitu: (John Friedman, 1979)

1. Modal produktif atas aset, misalnya tanah, rumah, peralatan dan kesehatan.
2. Sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi.
4. Network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai/
5. Informasi-informasi yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat dinyatakan miskin ditandai dengan adanya ketidakberdayaan atau kemampuan (*powerlessness*) dalam hal, yaitu: (Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003)

1. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*);

2. Melakukan kegiatan yang tidak produktif (*unproductiveness*);
3. Tidak dapat menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (*inaccessibility*);
4. Menentukan nasibnya sendiri dan mendapatkan perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*) dan Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat harga diri yang rendah (*no freedom for poor*)

2.1.2 Karakteristik Desa Miskin

Desa miskin adalah suatu daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal.

Lokasi desa miskin pada umumnya jauh dari pusat-pusat pelayanan "Kota Kecamatan". Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan, area yang luas, dan kondisi bentang lahan dengan topografi "berat" mengakibatkan transfer informasi, materi dan moneter antara desa dengan pusat pelayanan formal menjadi sangat terbatas. Pada umumnya transportasi antar desa dalam wilayah kecamatan masih sangat terbatas.

Permasalahan masyarakat desa untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidupnya adalah keterbatasan akses terhadap barang dan jasa utama seperti kesehatan, pendidikan, air, dan sumber daya alam lainnya, pasar dan kesempatan kerja. (Sukarno, Ari, & Dinanti, 2013)

2.1.3 Penyebab Kemiskinan Pedesaan

Penyebab kemiskinan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketersediaan akses maka manusia menghadapi keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Saat ini dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. (Mahaga, 2009)

Terdapat tiga penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan yang muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas.
2. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya mendapatkan pendapatan dan upah yang rendah. rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan akses.

Terkait dengan penyebab kemiskinan, menurut World Bank setidaknya terdapat tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya. (Hendra, 2010)

2.2 Modal Sosial

2.2.1 Pengertian Modal Sosial

Modal sosial pertama kali dikembangkan oleh Coleman dan dikembangkan lagi oleh Putnam dan peneliti lainnya. Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya dari berbagai entitas yang berbeda, terdiri dari berbagai aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu dari masyarakat. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran kehidupan sosial yang memungkinkan para partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial merupakan konsep yang didasarkan pada nilai jaringan sosial, dimana menurut Mitchell (1969:10-29) jaringan sosial sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur (1) kekompakan dan kepadatan/

kerapatan (*density*), (2) frekuensi pertemuan dan muatan pembahasan pada tingkatan partisipasi (*rate of participation*) dan (3) rentang kendali dan tahapan hubungan atau sentralitas (*centrality*).

Modal sosial diidentifikasi dan dideskripsikan secara berbeda-beda. Pretty and Ward (2001) mengidentifikasi empat aspek utama modal sosial yaitu :

1. Hubungan saling percaya (*relations of trust*)
2. Adanya pertukaran (*reciprocity and exchange*)
3. Aturan umum (*common rules*), norma-norma (*norm*), dan sanksi-sanksi (*sanction*)
4. Keterkaitan (*connections*), jaringan (*networks*), kelompok-kelompok (*groups*)

Sedangkan komponen-komponen kunci modal sosial menurut Putnam (1993), Fukuyama (2002), serta oleh Knack and Keefer (1997) yaitu:

1. Jaringan pertemuan/ dialog masyarakat (*networks of civic engagement*)
2. Norma-norma yang saling berinteraksi/ timbal balik (*norms of generalized reciprocity*)
3. Kepercayaan sosial (*social trust*)(Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011)

Modal sosial didefinisikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 1994 sebagai jaringan dengan norma-norma, nilai-nilai dan pemahaman yang memfasilitasi kerjasama di dalam atau diantara kelompok-kelompok masyarakat. Jaringan yang dimaksud menghubungkan antar kelompok maupun kelompok dengan individu (*Organisation for Economic Co-operation Development, 1994*).

Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. (Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2008)

Dengan demikian, dalam pengertian yang lebih luas modal sosial bisa berbentuk jaringan sosial atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati, kewajiban, norma pertukaran, dan *civic engagement* yang kemudian diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. dalam level mekanismenya, modal sosial dapat mengambil

bentuk kerjasama sebagai upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik atau permasalahan. (Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2008).

Modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (*self-reinforcing*). Oleh karena itu, modal sosial tidak akan habis jika digunakan, melainkan akan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena tidak dipergunakan. Modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain. Bersandar pada norma-norma dan nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 2002). Terkait dengan hal tersebut, terdapat tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*). (Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2008)

2.2.2 Tipologi Modal Sosial

Tipologi modal sosial dalam pendekatan yang sederhana membagi menjadi tiga kategori utama (Woolcock, 2001):

A. Modal Sosial Terikat (*Bonding Social Capital*)

Hubungan ke orang berdasarkan identitas yang umum, seperti keluarga teman dekat dan orang satu suku atau etnis. Jaringan ikatan adalah hubungan dekat yang membantu orang mendapatkan sesuatu. Koneksi ini biasanya dengan keluarga, teman, dan tetangga.

Modal sosial terikat cenderung bersifat eksklusif, sifat yang terkandung hanya terbatas kepada interaksi kelompok masyarakat. Realisasi dari modal sosial ini lebih kedalam (*inward looking*) pada ragam masyarakat yang pada umumnya homogen. Kelompok masyarakat dalam modal sosial terikat ini disebut dengan *sacred society*.

Sacred society mengedepankan doktrin tertentu dan mempertahankan sifat dari masyarakat yang *totalitarian*, *hierarchical* serta tertutup. Pola interaksi sehari-hari mengedepankan norma yang menguntungkan anggota kelompok hierarki tertentu serta feodal. Walaupun kelompok masyarakat ini mempunyai

keeksklusifan yang kuat namun tidak kuat untuk menciptakan modal sosial yang kuat.

Walaupun masyarakat ini bersifat *inward looking* bukan berarti masyarakat ini tidak mempunyai modal sosial, modal sosial itu ada akan tetapi hanya mempunyai akses terbatas serta kekuatan yang terbatas pula dalam satu dimensi saja. Dimensi itu yakni kohesifitas dimana pola nilai yang melekat lebih tradisional.

Bonding social capital di suatu komunitas masyarakat akan kuat di saat:

1. Warga saling percaya dimana kepercayaan terjadi dalam hubungan pribadi yang kuat dan sering membangun kepercayaan yang kuat.
2. Warga dengan latar belakang sosial yang umum terlibat satu dengan yang lain. Keluarga, tetangga, kelompok masyarakat melakukan aktivitas sosial bersama-sama.

B. Modal Sosial Menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Yaitu hubungan yang melebihi rasa berbagi identitas. (seperti teman kerja, kolega atau rekan). Jaringan bridging adalah hubungan yang tidak kuat, tapi memberi orang lebih banyak kesempatan. Menjembatani orang-orang yang berbeda latar belakang yang tergabung dalam kelompok masyarakat.

Modal sosial ini yang disebut sebagai asosiasi, grup, atau lebih umum kita menyebutnya masyarakat. Prinsip yang dianut berdasarkan keuniversalan tentang persamaan, kebebasan serta nilai-nilai kemajemukan, humanitarian.

Prinsip kemajemukan dan humanitarian, bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain yang merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, kelompok, atau suatu masyarakat. Kehendak kuat untuk membantu orang lain, merasakan penderitaan orang lain, berempati terhadap situasi yang dihadapi orang lain, adalah merupakan dasar-dasar ide humanitarian.

Bentuk modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*) umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil kajian di banyak negara menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya bentuk modal sosial yang menjembatani ini memungkinkan perkembangan di banyak dimensi kehidupan, terkontrolnya

korupsi, semakin efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkat dan bangsa menjadi jauh lebih kuat.

Bridging social capital dalam komunitas masyarakat akan kuat disaat:

1. Warga pada dasarnya dengan latar belakang yang berbeda saling percaya dalam menjembatani norma-norma masyarakat.
2. Warga dengan latar belakang sosial yang berbeda terlibat dan saling membantu satu dengan yang lain. Dalam menjembatani jaringan, orang-orang dengan latar belakang budaya, lingkungan, keyakinan berbeda datang secara bersama dalam suatu acara atau kegiatan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat.

C. Modal Sosial yang Menghubungkan (*Linking Social Capital*)

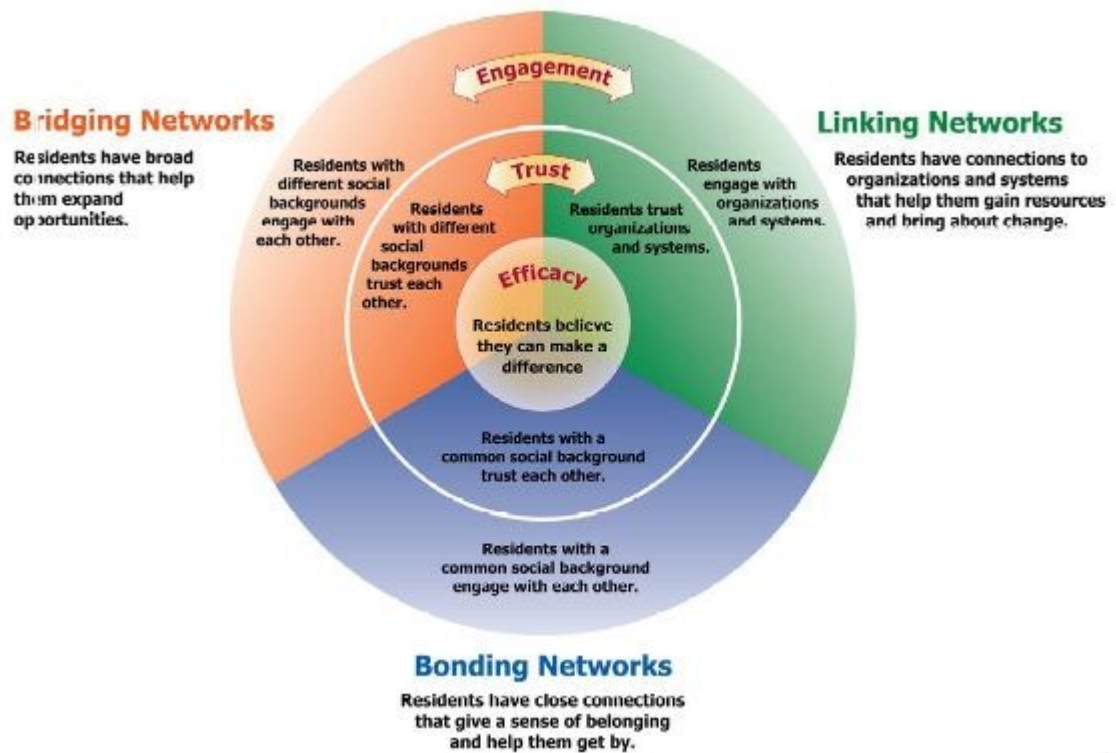
Yaitu hubungan ke orang atau kelompok lebih atas atau lebih rendah ke bawah tangga sosial. Jaringan yang terhubung membuat akses ke organisasi dan sistem yang membantu masyarakat mendapatkan sumber daya dan membawa perubahan dalam konteks bermasyarakat. Koneksi biasanya terjalin antara kelompok masyarakat dengan stakeholder maupun pemerintah lokal maupun pemerintah daerah serta bank.

Modal sosial "*linking*" lebih memberikan perhatian kepada hubungan yang bersifat vertikal dengan kelembagaan dan pengambil keputusan. Modal sosial dikatakan sebagai *linking* ketika masyarakat atau kelompok masyarakat memiliki hubungan jejaring terhadap pihak-pihak lain yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi misalnya: instansi pemerintah, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan, partai politik, kepolisian, perbankan, dan sebagainya.

Linkages di kelompok masyarakat akan kuat disaat:

1. Masyarakat percaya kepada pemimpin baik lembaga atau organisasi publik maupun pemimpin pada lembaga swasta. Masyarakat percaya bahwa pemimpin akan mendengarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan akan menindaklanjuti komitmen yang terjalin antara pemimpin dan kelompok masyarakat.

2. Warga terlibat dengan para pemimpin lembaga publik dan swasta. Terdapat interaksi antara orang yang memiliki berbagai tingkat status dan kekuasaan.



Gambar 2. 1 Community Social Capital Model

Sumber: (The University of Minnesota Extension Center for Community Vitality, 2009)

Model perpanjangan modal sosial menunjukkan bahwa modal sosial secara keseluruhan. Pada inti model tersebut adalah keberhasilan keyakinan bahwa seseorang dapat membuat perbedaan dalam berbagai konteks sosial. Cincin bagian dalam model menganggap percaya dalam setiap dari ketiga jenis jaringan modal sosial. Cincin luar menganggap jenis keterlibatan dalam masing-masing jenis jaringan. Ketika kondisi di masing-masing aspek modal sosial kuat, masyarakat lebih mampu menyalurkan kemampuan mereka dan berperan dalam pemecahan masalah sosial masyarakat.

Terdapat beragam metode pengukuran modal sosial yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal (Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2008). Model-model tersebut adalah:

A. *World Values Survey*

Model ini digunakan oleh Ronald Inglehart, untuk memahami peran faktor budaya dalam pembangunan politik dan ekonomi. Aspek yang paling terkait dengan modal sosial dalam model ini adalah *trust* (kepercayaan) dan keanggotaan dalam suatu asosiasi. Sekalipun hasil survei ini tidak membuktikan adanya korelasi langsung antara modal sosial dengan pembangunan politik dan ekonomi, namun hasil temuan Inglehart memperkuat asumsi Putnam bahwa organisasi sukarela memainkan peran positif untuk memperkuat tahap awal dari pembangunan ekonomi.

B. *New South Wales Study*

Ony dan Bullen, mengembangkan alat ukur praktis untuk mengukur modal sosial pada skala organisasi komunitas, serta dampaknya pada pengembangan partisipasi publik. Model ini menggunakan 8 (delapan) faktor sebagai indikator bagi modal sosial, yakni: (a) partisipasi di tingkat komunitas lokal; (b) aktivitas dalam konteks sosial; (c) perasaan kepercayaan dan keamanan; (d) koneksi dalam lingkungan ketetanggaan; (e) koneksi dengan keluarga dan teman-teman; (f) toleransi terhadap perbedaan; (g) nilai-nilai kehidupan; (h) koneksi dalam lingkungan pekerjaan.

C. *The Barometer of Social Capital Colombia*

John Sudarsky, mengembangkan model pengukuran modal sosial dengan menggunakan 8 dimensi yakni: (a) kepercayaan terhadap institusi; (b) partisipasi kewargaan; (c) saling ketergantungan dan imbal balik; (d) relasi horizontal; (e) hierarki; (f) kontrol sosial; (g) pemerintahan sipil; dan (h) partisipasi politik

D. *Index of National Civic Health*

Modal sosial dalam indeks ini dilakukan dengan menggunakan 5 indikator, yakni: (a) keterlibatan politik; (b) kepercayaan; (c) keanggotaan dalam asosiasi; (d) keamanan dan kejahatan; serta (e) integritas dan stabilitas keluarga. Keterlibatan politik mencakup pemberian suara dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Kepercayaan diukur melalui tingkat kepercayaan pada orang lain dan institusi pemerintah. Keanggotaan dalam asosiasi diukur melalui keanggotaan dalam suatu kelompok, partisipasi di komunitas dan menjadi pengurus di organisasi lokal. Dimensi keamanan dan kejahatan menekankan pada

jumlah kasus pembunuhan di kalangan pemuda dan jumlah kejahatan yang dilaporkan. Sementara dimensi stabilitas dan integritas keluarga diukur dari tingkat perceraian dan jumlah kelahiran di luar nikah.

E. *Global Social Capital Survey*

Model ini dikembangkan oleh Deepa Narayan, dengan menggunakan 7 indikator untuk mengukur ketersediaan modal sosial. Ketujuh indikator tersebut adalah: (a) karakteristik kelompok (meliputi jumlah kenaggoatan; kontribusi dana; frekuensi partisipasi; partisipasi dalam pengambilan keputusan; heterogenitas keanggotaan; sumber pendanaan bagi organisasi); (b) norma-norma umum (meliputi kesediaan menolong orang lain; kepedulian pada orang lain; keterbukaan pada orang lain); (c) kebersamaan (meliputi seberapa jauh orang-orang dapat hidup bersama; tingkat kebersamaan di antara orang-orang); (d) sosialisasi keseharian; (e) hubungan ketetanggaan (meliputi kesediaan meminta tolong pada tetangga untuk merawat anak yang sakit; atau membantu diri sendiri yang sedang sakit); (f) voluntarisme (meliputi kepercayaan pada keluarga; pada tetangga; pada orang dari kelas yang berbeda; pada pemilik usaha; pada aparat pemerintah; pada penegak hukum, seperti jaksa, hakim, dan polisi; pada aparat pemerintah daerah).

F. *Social Capital Assesment Tool*

Model ini menggunakan sejumlah instrumen untuk mengukur modal sosial, antara lain dengan menggunakan pemetaan komunitas, pemetaan aset, kuisisioner, wawancara, dan lembar penilaian. Unit analisisnya adalah komunitas dan rumah tangga.

G. *Integrated Questionnaire for The Measurement of Social Capital (SC-IQ)*

Model ini dikembangkan oleh Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock, dengan penekanan fokus pada negara-negara berkembang. Model ini bertujuan memperoleh data kuantitatif pada berbagai dimensi modal sosial dengan unit analisis pada tingkat rumah tangga. Pada model ini, digunakan 6 indikator, yakni: (a) kelompok dan jejaring kerja; (b) kepercayaan dan solidaritas; (c) aksi kolektif dan kerjasama (cooperation); (d) informasi dan komunikasi; (e) kohesi dan inklusivitas sosial; serta (f) pemberdayaan dan tindakan politik.

Sedangkan model perhitungan yang dipakai untuk penelitian ini adalah model perhitungan *Social Network Analysis* (SNA). Model perhitungan modal sosial dengan menggunakan SNA didasarkan pada penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian “Community participation on water management case Singosari District, Malang Regency, Indonesia” (Ari, Ogi, Matshushima, & Kiyoshi, 2012). Model pengukuran modal sosial dengan melihat jaringan sosial masyarakat ini dikembangkan oleh Stanley Wasserman & Katherine Faust pada tahun 1994 dengan mengukur nilai: (a) kerapatan (densitas) masyarakat, (b) tingkat partisipasi (*rate of participation*), dan (c) sentralitas (*centrality*). (Wasserman & Faust, 1994). Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan oleh Ismu Rini Dwi Ari dalam bukunya *Community Based Water Management and Social Capital* pada tahun 2014. (Kobayashi, Syabri, Ari, & Jeong, 2014)

2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain (Yulianti, 2012):

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu.
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (1968) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap (Yulianti, 2012), yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan (*idea panning stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/ proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)

Pada tahap ini, pelibatan seseorang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/ barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*)

Pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. (Yulianti, 2012).

2.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd)

Program penanggulangan PNPM Mandiri dalam konteks peningkatan pelayanan publik sebagai media pembelajaran masyarakat. PNPM Mandiri sebagai suatu program pemerintah yang menekankan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat sehingga mendorong proses transformasi yang bertujuan membangun dan memperkuat kapasitas komunitas (kelompok-kelompok masyarakat) melalui upaya pembelajaran langsung dalam keseharian masyarakat. (Mandiri, 2009).

2.4.1 Visi, Misi dan Tujuan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya

kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya diluar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.(PNPM, 2008)

Dalam mencapai visi PNPM Mandiri Perdesaan terdapat misi antara lain:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu(PNPM, 2008):

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal
3. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

2.4.2 Prinsip Dasar PNPM-MPd

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan

program PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan(PNPM, 2008) meliputi:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik saja.
2. Otonomi, yaitu masyarakat memiliki hak dan kewajiban mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
3. Desentralisasi, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin, yaitu segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Partisipasi, yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
6. Kesetaraan dan keadilan gender, yaitu masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
7. Demokratis, yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat
8. Transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif
9. Prioritas, yaitu masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

10. Keberlanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus mempertimbangkan sistem pelestariannya.

2.4.3 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Sedangkan pelaku utama lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing, dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Berikut pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan:

A. Pelaku di Desa

Tabel 2. 1 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Tingkat Desa

No	Pelaku di Desa	Peran
1	Kepala Desa	Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Mengawasi proses dari setiap tahapan termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian
3	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengelola administrasi serta keuangan
4	Tim Penulis Usulan (TPU)	Menyiapkan dan menyusun gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa
5	Tim Pemantau	Memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di desa
6	Tim Pemelihara	Pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan.
7	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (KPMD/K)	Memfasilitasi dan memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada semua tahapan.

Sumber: (PNPM, 2008)

B. Pelaku di Kecamatan

Tabel 2. 2 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Tingkat Kecamatan

No	Pelaku di Kecamatan	Peran
1	Camat	Pembina pelaksanaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan serta membuat Surat Penetapan Camat (SPC)
2	Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)	Seorang Kasi Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM MPd di kecamatan
3	Tim Verifikasi (TV)	Melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta program dan membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa

4	Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	Sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa
5	Badan Pengawas UPK	Mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK
6	Fasilitator Kecamatan	Pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM MPd
7	Pendamping Lokal (PL)	Membantu fasilitator kecamatan memfasilitasi melaksanakan tahapan kegiatan PNPM MPd
8	Tim Pengamat	Memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa
9	Badan Kerjasama Antar Desa	Merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK
10	Setrawan Kecamatan	Melibatkan diri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan

Sumber: (PNPM, 2008)

2.4.4 Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan ada 2 (Mandiri, 2009), yaitu:

1. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Kelompok Sasaran

- a. Masyarakat miskin perdesaan
- b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan
- c. Kelembagaan pemerintah lokal

2.5 Social Network Analysis (SNA)

Penggunaan metode *Social Network Analysis* (SNA) didasarkan pada penelitian Ismu Rini Dwi Ari (2012) dalam jurnal *Procedia Environmental Science* yang berjudul *Community participation on water management; case Singosari District, Malang Regency, Indonesia*. Analisis jaringan sosial atau SNA didefinisikan sebagai pemetaan dan pengukuran hubungan dan interaksi dalam sebuah kesatuan lembaga lokal yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, informasi dan beragam pelayanan sosial didalamnya. *Social network* adalah studi terhadap entitas sosial (misalnya peran seseorang dalam suatu organisasi) dan interaksi serta relasi antar entitas tersebut. Menurut Budi Susanto (2013), interaksi dan hubungan dapat dinyatakan dengan suatu jaringan atau graf, dimana setiap

vertex (*node*) menyatakan suatu hubungan. Dari jaringan tersebut, dapat dipelajari properti strukturnya, peran, posisi, dan martabat dari setiap pelaku sosial.

Borgatti (1999) mendefinisikan jaringan sosial sebagai kumpulan *node* (juga disebut sebagai simpul atau aktor) bersama-sama dengan satu hubungan (juga dikenal sebagai *link*) yang menghubungkan pasangan *node*. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa secara umum, sudah terbiasa untuk mewakili hubungan sosial seperti berteman dengan siapa, atau terdapat supervisor dari mereka.

Jaringan sosial didefinisikan dalam perspektif jaringan sosial oleh Wasserman dan Faust (1994) meliputi teori, model, dan aplikasi yang dinyatakan dalam konsep relasional atau proses. Artinya, hubungan didefinisikan oleh hubungan antara unit-unit adalah komponen dasar teori jaringan. Selain itu, mereka menyatakan empat prinsip SNA yaitu:

1. Aktor dan tindakan mereka dipandang sebagai saling tergantung daripada independen, unit otonom. Perilaku manusia tertanam dalam jaringan hubungan interpersonal.
2. Hubungan relasional (hubungan) antara aktor adalah saluran untuk transfer aliran sumber daya (baik materi ataupun materi). Jaringan koneksi merupakan modal sosial, dan jaringan terstruktur dengan baik dapat memberikan tingkat modal sosial yang tinggi.
3. Model jaringan berfokus pada individu melihat lingkungan jaringan struktural memberikan kesempatan untuk kendala dan masalah pada tindakan individu.
4. Model jaringan konsep struktur (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) sebagai pola abadi dari hubungan antar sektor.

Dalam penelitian ini, diberikan fokus penelitian tipologi modal sosial masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah studi dengan menghitung variabel modal sosial berupa densitas, tingkat partisipasi dan sentralitas untuk melihat jaringan sosial dan mengidentifikasi tipologi modal sosial dalam masyarakat pemanfaat PNPM MPd.

2.5.1 Densitas (density)

Analisis densitas dilakukan untuk mengetahui kerapatan dari hubungan responden dalam satu wilayah studi. Menurut Wasserman dan Faust (1994) nilai

densitas dalam sebuah hubungan antar responden di masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rata-rata aktifitas yang terjadi oleh setiap pasang aktor. Nilai densitas juga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi responden yang berbagi keanggotaan dalam setiap kelembagaan. Nilai densitas berada pada kisaran 0-1. Densitas dapat dihitung menggunakan rumus dari Wasserman dan Faust (1994) sebagai berikut.

2.5.2 Rate of Participation

Analisis *rate of participation* dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat. Analisis tingkat partisipasi dilakukan dengan menghitung keikutsertaan masyarakat dalam kelompok sosial yang ada di wilayah studi.

2.5.3 Sentralitas

Menurut Budi Susanto (2013) tujuan dari analisis jaringan sosial dengan menggunakan metode *centrality* pada suatu graf adalah untuk menemukan kekuatan dan pengaruh individu (*node*) yang paling berperan dalam sebuah jaringan sosial di masyarakat.

Mengacu pada Wasserman dan Faust (1994), penelitian jaringan afiliasi sebagai hubungan *nondirectional* dimana baris ke- i dari matriks X , $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ig})$, identik dengan kolom ke- i ($x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{gi}$). Dengan demikian, keunggulan *aktori* dalam jaringan didasarkan pada pola hubungan ini $g-1$ mungkin dalam matriks jaringan afiliasi, menentukan lokasi aktor. Selain itu, karena fokus penelitian terdapat pada hubungan *nondirectional*, sejalan dengan Knoke & Burt (1983), sentralitas merupakan indeks yang paling tepat untuk mendefinisikan lebih baik aktor pentingnya dengan mereka yang memiliki visibilitas lebih dan untuk memahami makna yang lebih baik konsep tersebut. Dengan demikian, untuk hubungan *non directional*, kita mendefinisikan sebuah aktor sentral sebagai salah satu yang terlibat dalam hubungan banyak.

A. Degree centrality

Menurut Everett dan Borgatti (1999), dalam jaringan dua-mode, sentralitas gelar baku untuk n_i aktor didefinisikan sebagai jumlah kejadian yang diikuti para aktor, $C_D(n_i)$. Dan, jumlah aktor berpartisipasi peristiwa atau jumlah anggota dalam m_k kelompok adalah definisi untuk sentralitas gelar baku untuk suatu even, $C_D(m_k)$.

Gagasan *Deegre Centrality* adalah untuk menemukan aktor yang menempati posisi penting karena mereka merupakan aktor dengan aktivitas tertinggi atau memiliki jumlah link yang terbanyak. *Deegre Centrality* mengukur aktivitas aktor, bahwa aktor harus sangat aktif yang memiliki indeks pusat maksimal. Sehubungan dengan Wasserman dan Faust (1994), dalam 2-mode data, tingkat sentralitas untuk aktor adalah tingkat node, $d(n_i)$ dan karenanya mereka menentukan $C_D(n_i)$ sebagai indeks sentralitas aktor tingkat derajat. Selain itu, karena kita berurusan dengan hubungan non directional, maka $x_{ij} = x_{ji}$ dalam bentuk matriks *adjacency simetris*.

B. *Closeness centrality*

Jarak rata-rata antara node dengan semua node yang lain di jaringan. Ukuran ini menggambarkan kedekatan node ini dengan node lain. Semakin dekat, semakin terhubung orang tersebut dengan lainnya. Untuk mengukur jarak terpendek antar node dapat digunakan *minimum distance*.

Menurut Wasserman dan Faust (1994), *Closeness Centrality* mengukur seberapa dekat "jarak" aktor terhadap semua aktor-aktor lain dalam jaringan seperti yang telah dikembangkan di enam makalah oleh Bavelas (1950), Harary (1959c), Beauchamp (1965), Sabidussi (1966), Moxley dan Moxley (1974), dan Rogers (1974). Lebih lanjut, Wasserman dan Faust (1994) menyatakan gagasan bahwa seorang aktor adalah pusat jika dapat dengan cepat berinteraksi dengan semua orang lain, sehingga sentralitas berbanding terbalik dengan jarak. Dalam pengertian ini, kita dapat melihat bahwa ukuran *Closeness Centrality* tergantung pada kedua hubungan langsung dan tidak langsung, terutama untuk *non-adjacency* sepasang aktor.

Mengikuti Freeman (1979), Wasserman dan Faust (1994) mendefinisikan ukuran sederhana *closeness centrality* sebagai fungsi *geodesic distance*. Jarak antar aktor i dan j dinotasikan sebagai $d(n_i, n_j)$ yaitu jumlah baris dalam aktor menghubungkan geodesik i dan j sebagai fungsi jarak dan itu adalah panjang setiap jalur lintasan terpendek dari aktor. Oleh karena itu, total jarak satu aktor terhadap aktor lain adalah $\sum_{j=1}^g d(n_i, n_j)$. Dengan demikian, indeks kedekatan aktor seperti yang didefinisikan oleh Sabidussi (1979).

Indeks normalisasi mempunyai kisaran 0 sampai 1, dan dapat dilihat sebagai *inverse average distance* antara aktor i dan semua aktor lainnya (Faust dan Wasserman, 1994). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Faust (1994) mendefinisikan *Closeness Centrality* berdasarkan jarak geodesik-jalan terpendek dari aktor pusat dengan aktor lain dalam suatu jaringan dan hanya berlaku pada hubungan dikotomis. Selain itu ia juga menyebutkan bahwa dalam kasus beberapa pasang aktor tidak memiliki hubungan antar mereka, maka jarak antara mereka akan menjadi tidak terbatas dan sentralitas kedekatan akan terdefinisi dimana jarak geodesik dari aktor mengisolasi, n_k dengan nilai 0 karena aktor tidak *reachable* dari responden lain dengan panjang tak terhingga.

C. Betweenness Centrality

Ukuran ini memperlihatkan peran sebuah node menjadi *bottleneck* atau menjadi penting jika menjadi *communication bottleneck*. Ukuran ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi *boundary spanners*, yaitu orang atau node yang berperan sebagai penghubung antara dua komunitas/ kelompok masyarakat. *betweenness centrality* adalah sebuah node yang dihitung dengan menjumlahkan semua *shortest path* yang mengandung node tersebut.

Gagasan *betweenness centrality* adalah bahwa aktor akan menjadi pusat jika terletak pada aktor *geodesic* mereka, menyiratkan bahwa untuk memiliki “*betweenness centrality*” yang tinggi, aktor harus memiliki posisi antara banyak aktor melalui *geodesic* mereka. Dalam pengertian ini, aktor yang terletak pada jarak terpendek diantara banyak pasang aktor lain akan berpotensi memiliki kontrol atas interaksi antar jeda *non-adjacency* aktor. (Wasserman dan Faust, 1994).

Dalam rangka untuk mengkuantifisir ide *betweenness*, pertama kali Wasserman and Faust (1994) mempertimbangkan probabilitas aliran komunikasi, dengan mengajukan dua asumsi:

1. Garis dari suatu *path* dimana komunikasi akan berjalan sepanjang jarak terpendek untuk mencapai aktor k dari aktor j yang mempunyai bobot sama, sehingga
2. Komunikasi semacam itu akan mempunyai satu jarak geodesik. Kemudian, Freeman (1979) mengestimasi bahwa probabilitas suatu

komunikasi dari aktor j ke aktor k mengambil suatu turus khusus yang dinotasikan sebagai g_{jk} menjadi nomor dari gabungan geodesik dari dua aktor.

Seperti juga *degree centrality*, *indeks betweenness* dapat dikomputasi walaupun jika grafik tidak berhubungan atau ini adalah berbeda dengan indeks *closeness* yang harus mencapai aktor di dalam suatu jaringan. Mengacu pada Brandes dan Pich (1979), *closeness centrality* dan *betweenness centrality* adalah berdasar pada jarak lintasan terpendek (*geodesic distances*).

Matrik jarak geodesik adalah sebuah matrik jarak geodesik antara pasangan node, adalah jumlah dari hubungan lintasan terdekat diantara mereka. Sehingga, pengaruh atau komunikasi diantara mereka akan menurun sejalan dengan jarak diantara mereka. Oleh karena itu, matrik jarak geodesik dapat dipergunakan sebagai indeks pengaruh atau kohesi. Sebagai konsekuensinya, seorang aktor yang mempunyai *closeness centrality* tinggi adalah ketika total (dan juga rata-rata) jarak dari aktor kepada seluruh aktor yang lain adalah kecil, sementara itu seorang aktor yang mempunyai *betweenness centrality* tinggi adalah ketika secara relatif aktor berlokasi dalam jarak lintasan terpendek yang menghubungkan dengan aktor-aktor lainnya.

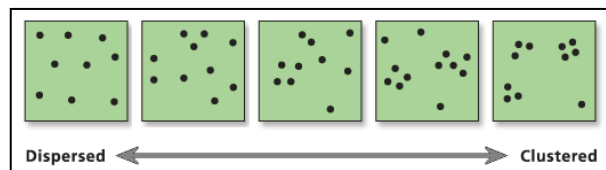
2.6 Analisis Kluster Spasial

Analisis Kluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya dengan mengklasifikasikan objek sehingga objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. Dasar penggunaan analisis kluster spasial dengan menggunakan *Nearest Neighbour Analysis* yaitu untuk melihat kedekatan jarak fisik dimana menurut Robert K. Merton (1967) dimana kedekatan jarak fisik diartikan sebagai pembentuk kelompok sosial masyarakat. Kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok sosial masyarakat.

A. Proses Analisis Kluster Spasial

Analisis kluster spasial (ArcGis Resources, 2013) yang digunakan memiliki tujuan meminimumkan jarak atau aturan tetangga terdekat. Dua objek pertama yang dikelompokkan adalah yang memiliki jarak terdekat, selanjutnya jarak yang terdeteksi. Nantinya jarak terdekat dapat diperlihatkan dengan overlay antara titik-titik dalam objek menggunakan GIS.

Penggunaan *Nearest Neighbor Analysis* bertujuan untuk menghitung indeks tetangga terdekat berdasarkan jarak rata-rata dari masing-masing fitur terdekatnya tetangga. *Average Nearest Neighbor* mengukur jarak antara masing-masing centroid fitur (point) dan point tetangga terdekat dan kemudian dilakukan rata-rata semua jarak tetangga terdekat. Jika jarak rata-rata kurang dari hipotesis rata-rata distribusi, maka distribusi fitur (point) yang dianalisis dianggap mengelompok (*klustered*). Jika jarak rata-rata lebih besar dari hipotesis distribusi fitur, maka fitur yang dianggap tersebar (*dispersed*) dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Ilustrasi Pengelompokan Hasil *Average Nearest Neighbor*

Sumber: <http://resources.arcgis.com/>

Average Nearest Neighbor dihitung sebagai jarak rata-rata yang diamati dibagi dengan jarak rata-rata yang diharapkan (dengan jarak rata-rata yang diharapkan yang berbasis pada distribusi acak hipotetis dengan jumlah yang sama fitur yang meliputi luas areal yang sama).

$$ANN = \frac{\bar{D}_O}{\bar{D}_E}$$

Sumber: www.resources.esri.com

Keterangan :

\bar{D}_O = rata-rata jarak yang diamati antara point-point

\bar{D}_E = rata-rata jarak yang diharapkan antar point-point

$$\bar{D}_O = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}$$

Sumber: www.resources.esri.com

$$\bar{D}_E = \frac{0.5}{\sqrt{n/A}}$$

Sumber: www.resources.esri.com

Keterangan :

d_i = penjumlahan antara jarak antar point i dan point terdekat lainnya

N = jumlah responden dalam bentuk point

A = luasan wilayah perencanaan

Nearest Neighbor z-score dalam statistik menggunakan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\bar{D}_O - \bar{D}_E}{SE}$$

$$SE = \frac{0.26136}{\sqrt{n^2/A}}$$

Sumber: www.resources.esri.com

Sumber: www.resources.esri.com

Pengelompokan berdasarkan kedekatan jarak antar objek memiliki beberapa syarat untuk mendapatkan segmen yang baik (Simamora, 2005), sebagai berikut:

1. Dapat diukur: dimana ukuran, daya beli dan karakteristik segmen dapat diukur.
2. Memadai: dimana segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Sebuah segmen sebuah kelompok berukuran besar yang homogen, sehingga mendapatkan program pemasaran secara khusus.
3. Dapat dijangkau: dimana segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif.
4. Berbeda: dimana sebuah segmen secara konseptual berbeda dan juga merespon stimulan pemasaran dengan cara berbeda.
5. Dapat ditindaklanjuti: dimana program efektif dapat dibuat untuk menarik dan melayani segmen.

2.7 Modal Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan

Modal sosial diartikan sebagai jalinan jaringan baik secara formal maupun informal satu dengan yang lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial diukur dengan menggunakan variabel sosio-demografi, manajemen sumberdaya, asosiasi lokal dan karakter masyarakat serta kesejahteraan ekonomi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel asosiasi dan karakter masyarakat berpengaruh positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi modal

sosial yang dimiliki oleh keluarga maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. (Suandi, 2007).

Terdapat kerangka teoritis terkait perencanaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dengan tiga aspek yaitu tindakan kolektif berupa kontribusi dalam pengelolaan dan penggunaan barang atau jasa publik, modal sosial yang berhubungan dengan manfaat individu/ anggota dalam jaringan sosial dan hubungan individu yang ditandai kepercayaan dan timbal balik, serta gerakan sosial terkait kerjasama dalam mengelola barang atau jasa publik secara bersama. yang dalam jurnal tersebut dianalisis masing-masing yang mengkaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Ketiga aspek tersebut mengedepankan pemahaman perencanaan berbasis masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan melalui tindakan dari masyarakat untuk masyarakat. (Mason & Beard, 2008).

2.8 Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan perdesaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Elemen modal sosial yang dinilai adalah tata nilai, kompetensi SDM, manajemen sosial, keorganisasian masyarakat, struktur sosial, kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hal ini berbeda dengan elemen modal sosial yang sering dikemukakan oleh pakar ekonomi di negara maju yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan/ hubungan (*network*) dan kerjasama (*cooperation*).

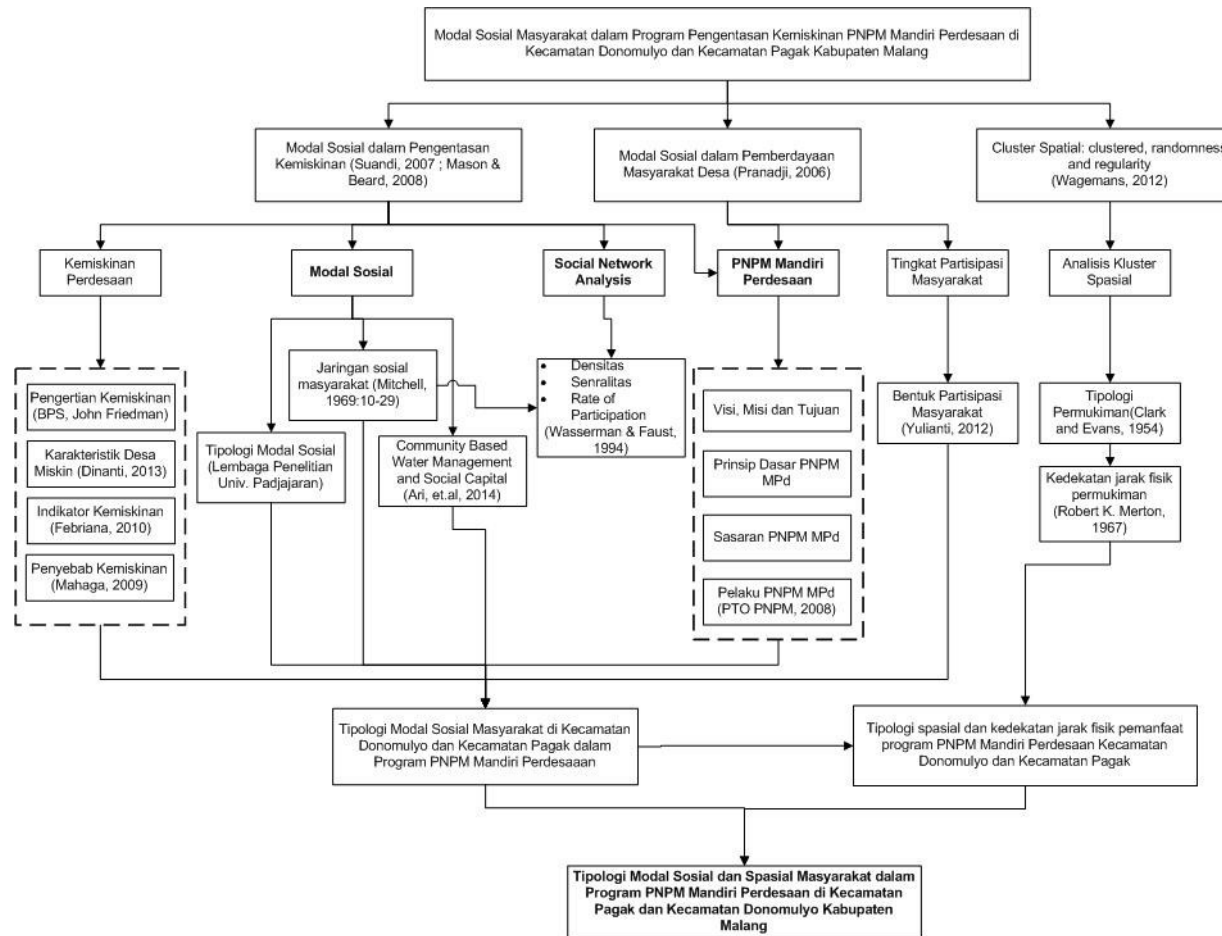
Hasil penelitian terkait modal sosial menunjukkan bahwa aspek kepercayaan (*trust*) menjadi komponen utama pembentuk modal sosial di perdesaan. Aspek lain seperti kerjasama (*cooperation*) dan jaringan (*network*) tidak akan terbentuk dengan baik jika tidak didasarkan kepercayaan antar anggota masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan kesenjangan modal sosial antardukuh yang berdekatan menunjukkan kemungkinan adanya ketidakharmonisan hubungan antar dukuh dalam satu desa. Kerangka penguatan modal sosial pada jurnal ini terdapat tiga aspek yaitu: terbentuknya kerjasama dan solidaritas, perluasan jaringan, dan peningkatan daya saing kolektif secara berkelanjutan (Pranadji, 2006).

2.9 Studi Terdahulu

Tabel 2. 3 Studi Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis yang Digunakan	Unit Analisis	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan
1	Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat	<i>Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran</i>	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan mengukur kondisi modal sosial di Jawa Barat Menganalisis keterkaitan antara modal sosial dengan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat Merumuskan desain pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan Jawa Barat 	<ol style="list-style-type: none"> Modal sosial Penanggulangan kemiskinan 	Analisis Kualitatif & Analisis Kuantitatif	Seluruh Bakorwil Jawa Barat → unit analisis terkecil desa/ kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> Perbedaan pada tujuan penelitian yaitu mengukur tingkat modal sosial masyarakat dalam program pengentasan Tidak menganalisis keterkaitan modal sosial dengan penanggulangan kemiskinan dan tidak merumuskan desain pemanfaatan modal sosial, hanya mengetahui aspek spasial yang mempengaruhi
2	Social Capital and Its “Downside”: The Impact on Sustainability of Induced Community-Based Organization in Nepal	Krishna Prasad Adhik Ari	<ol style="list-style-type: none"> Menganalisis peran modal sosial dalam keberlanjutan organisasi masyarakat Menganalisis keterkaitan antara modal sosial yang ada “modal sosial dan downside” 	<ol style="list-style-type: none"> Kognitif <ul style="list-style-type: none"> Kepercayaan Norma Sikap Struktural <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Kelompok 	Analisis Kuantitatif → Regresi Analisis Kualitatif	14 desa dan 129 kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan metode analisis regresi Tidak memperlihatkan aspek spasial yang mempengaruhi modal sosial
3	Household Contribution to Community Development in Indonesia	Victoria A. Beard	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan model regresi yang meneliti efek dari rumah tangga Mengetahui karakteristik masyarakat untuk mempengaruhi rumah tangga dalam kontribusi terkait pengembangan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi Kesejahteraan sosial Infrastruktur Lingkungan Waktu 	Analisis Regresi	Individu dalam rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan analisis regresi tobit Mengkaji hanya terkait kontribusi individu dalam rumah tangga tidak hubungan antar kelompok masyarakat

2.10 Kerangka Teori



Gambar 2.3 Kerangka Teori

